ABSTRAK

Azzahra Putri Darmawan, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Pertanian*

Pemberlakuan Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pertanian nasional. Regulasi ini dinilai lebih mengakomodasi kepentingan investasi dibanding kepentingan rakyat, sehingga memicu konflik agraria, perampasan tanah, dan pengabaian hak masyarakat adat.

Melalui pendekatan siyasah dusturiyah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi pasal-pasal yang mengatur klaster pertanian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menelaah norma hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah, serta mengkaji regulasi klaster pertanian tersebut melalui perspektif siyasah dusturiyah

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data primer diperoleh dari UUD 1945, UUPA 1960, serta peraturan turunan Undang Undang Cipta Kerja, sementara data sekunder dari literatur hukum dan kajian akademik. Analisis difokuskan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama: teori kepastian hukum, kewajiban negara, dan kepemilikan dalam Islam. Ketiganya menjadi alat kritik terhadap arah kebijakan pertanian agar berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa klaster pertanian dalam UU No. 6 Tahun 2023 dengan mengaitkannya pada Pasal 33 UUD 1945 dan perspektif siyasah dusturiyah. Regulasi ini menghadirkan instrumen baru seperti Bank Tanah, Hak Pengelolaan, hak ruang atas-bawah tanah, dan digitalisasi dokumen yang ditujukan untuk mendukung investasi. Namun, penerapannya dinilai cenderung menguntungkan investor dan memperlebar ketimpangan akses tanah, sementara perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani kecil masih lemah. Hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah juga memperlihatkan dominasi negara atas tanah tanpa partisipasi masyarakat yang memadai. Dari perspektif siyasah dusturiyah, regulasi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip masalah dan keadilan sosial, sebab orientasi hukum lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dibanding pemerataan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Kata Kunci : *Undang Undang Cipta Kerja, Klaster Pertanian, Siyasah Dusturiyah*